

ANALISA INDIKATOR SMK PENYUMBANG PENGANGGURAN DI PROVINSI JAWA TIMUR

Akhmad Mukhlason¹⁾, Titiek Winanti²⁾, dan Eppy Yundra³⁾

^{1, 2, 3)} Program Studi S3 Pendidikan Vokasi Universitas Negeri Surabaya

e-mail: akhmad.19020@mhs.unesa.ac.id¹⁾, titiekwinanti@unesa.ac.id²⁾, eppyundra@unesa.ac.id³⁾

ABSTRAK

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni merupakan modal utama dalam membangun suatu bangsa. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah pendidikan menengah yang didesain untuk mempersiapkan generasi bangsa untuk bias bekerja sesuai dengan kompetensi keahlian masing-masing. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan pengembangan kemampuan pesertadidik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. SMK dibangun untuk tujuan membentuk tenaga kerja yang terampil, siap kerja, dan berdaya saing. Sehingga melalui pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan dapat membantu akan pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan kompeten dalam bidangnya. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat berakibat pada meningkatnya jumlah angkatan kerja. Semakin banyak jumlah angkatan kerja yang tidak terserap maka akan meningkatkan jumlah pengangguran. SMK sebagai pranata pendidikan jenjang menengah seharusnya menjadi pilihan utama yang menyiapkan lulusannya siap pakai di DU/DI. Hal ini karena tujuan utama pendidikan SMK adalah menyiapkan SDM unggul yang siap pakai pada dunia kerja, memiliki kepemimpinan tinggi, disiplin, profesional, handal di bidangnya dan produktif. Melihat ketimpangan yang terjadi antara harapan dengan fakta yang ada, maka perlu dilakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor penyebab SMK menjadi penyumbang terbesar dalam pengangguran terbuka sehingga akan dapat dibuat rumusan rekomendasi sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

Kata Kunci: Kompetensi, Pengajar, Pengangguran, SMK.

ABSTRACT

The availability of qualified human resources (HR) is the main capital in building a nation. Vocational High School (SMK) is a secondary education that is designed to prepare the nation's generation to be able to work in accordance with their respective expertise competencies. Vocational secondary education prioritizes the development of the ability of students to carry out certain types of work. SMK is built for the purpose of creating a skilled, work-ready, and competitive workforce. So that through education at the Vocational High School level (SMK) is expected to help the fulfillment of a skilled and competent workforce in their fields. Rapid population growth results in an increase in the workforce. The more the number of labor force that is not absorbed, the more unemployment will increase. Vocational school as a secondary level education institution should be the main choice that prepares graduates ready to use at DU / DI. This is because the main objective of vocational education is to prepare superior human resources who are ready to use in the world of work, have high leadership, discipline, professional, reliable in their fields and productive. Seeing the imbalance that occurs between expectations and the available facts, it is necessary to conduct an in-depth study of the factors that cause SMKs to be the biggest contributors to open unemployment so that recommendations can be made as a solution to existing problems.

Keywords: Competence, Teacher, Unemployment, Vocational School

I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam peningkatan kualitas suatu bangsa dan negara. Melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu maka kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu negara akan meningkat. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni merupakan modal utama dalam membangun suatu bangsa. Melalui SDM yang handal maka pengolahan sumber daya alam (SDA) suatu negara dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan warganya. Dengan demikian, kesejahteraan dan peningkatan kualitas bangsa sesungguhnya bergantung pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya, dan untuk mewujudkannya maka diperlukan kualitas penyelenggaraan pendidikan [4].

Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan pengembangan kemampuan pesertadidik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. SMK dibangun untuk tujuan membentuk tenaga kerja yang terampil, siap kerja, dan berdaya saing. Sehingga melalui pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diharapkan dapat membantu akan pemenuhan tenaga kerja yang terampil dan kompeten dalam bidangnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk: meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokra-

tis dan bertanggung jawab; mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Pengangguran yang tinggi tersebut dimungkinkan terjadi karena dua faktor, yaitu (1) kompetensi yang dimiliki lulusan SMK lebih rendah dibandingkan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha/industri (DU/DI), atau bahkan kompetensi yang dilatihkan sekolah sudah tidak sesuai dengan tuntutan DU/DI, atau (2) ketersediaan daya serap lulusan SMK pada dunia industri / dunia usaha sangat sedikit sehingga tidak mampu menampung seluruh lulusan SMK [3].

SMK sebagai pranata pendidikan jenjang menengah seharusnya menjadi pilihan utama yang menyiapkan lulusannya siap pakai di DU/DI. Hal ini karena tujuan utama pendidikan SMK adalah menyiapkan SDM unggul yang siap pakai pada dunia kerja, memiliki kepemimpinan tinggi, disiplin, profesional, handal di bidangnya dan produktif. Dengan demikian, lulusan SMK idealnya merupakan tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai, dalam arti langsung bisa bekerja di dunia usaha dan industri [3].

Melihat ketimpangan yang terjadi antara harapan dengan fakta yang ada, maka perlu dilakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor penyebab SMK menjadi penyumbang terbesar dalam pengangguran terbuka sehingga akan dapat dibuat rumusan rekomendasi sebagai solusi atas permasalahan yang ada.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisa Tingkat Kompetensi dan Ketersediaan Pengajar Produktif Pada SMK

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 mengamanatkan tentang tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut dicirikan dengan kemampuan manusia Indonesia yang mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mempunyai budi pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani, dan jasmani, keterampilan dan pengetahuan, dan memiliki rasa tanggung jawab untuk berbangsa dan bermasyarakat. Sekolah sebagai pranata pendidikan sebagai wadah untuk mewujudkan tujuan nasional memiliki peran penting. Terdapat beberapa komponen yang ada di sekolah, diantaranya: (1) sumber daya manusia, yang meliputi: guru, siswa, dan tenaga kependidikan, (2) kurikulum, (3) sarana dan prasarana.

Faktor penentu keberhasilan pendidikan di sekolah yang utama adalah guru. Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 telah memberikan rambu-rambu tentang prinsip-prinsip yang harus dikuasai guru sebagai bagian dari profesi adalah a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) Memiliki komitmen meningkatkan kualitas pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2017 menyatakan bahwa guru hendaknya memiliki minimal 4 kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional.

Aspek kompetensi pedagogik menyangkut tentang kemampuan guru dalam mengelola dan mengembangkan pembelajaran dengan memahami karakteristik peserta didik sehingga guru dapat mengetahui secara maksimal kebutuhan dalam belajar. Beberapa komponen yang perlu dikuasai guru dalam ranah aspek pedagogik antara lain: a) Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan, b) Pemahaman terhadap perkembangan peserta didik, c) Pengembangan kurikulum, d) Perencanaan pembelajaran dengan memperhatikan unsur teknik, pendekatan, strategi, model dan metode pembelajaran, e) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, f) Pemanfaatan teknologi pembelajaran, g) menilai proses dan hasil belajar, h) Pengembangan potensi peserta didik.

Aspek pedagogik adalah hal dasar yang sangat penting bagi guru. Melalui penguasaan dalam bidang kompetensi pedagogik, maka guru akan memahami karakteristik peserta didik sehingga dapat membantu peserta didik secara maksimal dalam melejitkan potensi, pembiasaan karakter dan penemuan jati diri peserta didik. Melalui penguasaan aspek kompetensi pedagogik, guru dapat merancang proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diharapkan kurikulum. Rancangan guru yang dikembangkan mampu membangkitkan motivasi dalam belajar. Pembelajaran menjadi lebih hidup dan bermakna bagi peserta didik. Penguasaan guru dalam evaluasi proses dan hasil belajar mampu memberikan umpan balik yang bermakna bagi peserta didik. Kompetensi yang dikuasai siswa dapat terukur secara nyata. Guru dapat memanfaatkan hasil evaluasi sebagai bahan untuk mengukur kualiti-

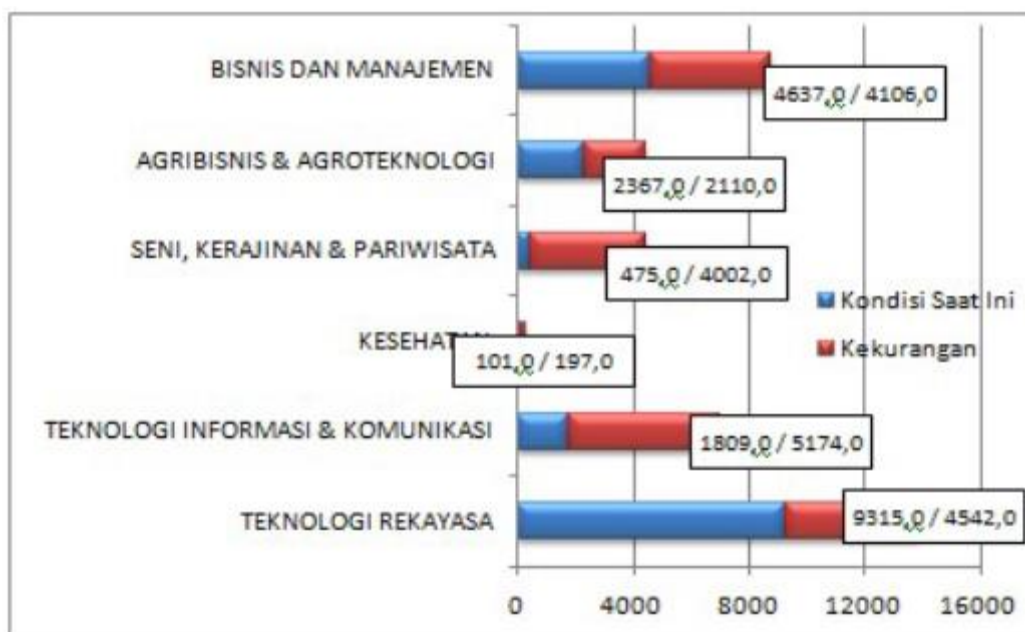
tas pembelajaran, dan ketercapaian indikator yang ditetapkan atau target kurikulum yang ditetapkan. Selain itu, kemampuan guru dalam evaluasi juga dapat bermanfaat memberikan tambahan kompetensi melalui program pengayaan pembelajaran.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa kemampuan guru dalam aspek kompetensi pedagogik merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Selain aspek kompetensi pedagogik, aspek lain yang sangat penting dalam penjaminan kualitas pendidikan adalah kemampuan guru dalam aspek kompetensi profesional. Kompetensi profesional dapat diartikan sebagai keahlian dan keterampilan khusus terhadap penguasaan materi pelajaran secara mendalam, utuh dan komprehensif. Kompetensi tersebut menyangkut beberapa hal berikut: a) penguasaan guru terhadap konsep, struktur, dan metode keilmuan / teknologi / seni yang sesuai dengan materi ajar; b) pemahaman materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; c) kemampuan menghubungkan konsep antar mata pelajaran terkait; d) kemampuan guru dalam menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari; dan e) adanya kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki tiga jenis guru, yaitu guru adaptif, normatif dan guru produktif. Guru adaptif merupakan guru yang mengajarkan pelajaran yang bersifat adaptif, membantu untuk mengembangkan pelajaran sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada, seperti matematika, fisika, dan kimia. Guru normatif adalah guru yang mengajarkan pelajaran yang bersifat norma, budi pekerti seperti agama, dan kewarganegaraan yang bersifat wajib atau peplajaran dasar. Sedangkan guru produktif adalah guru yang mengajarkan mata pelajaran kejuruan (kompetensi keahlian) seperti teknik kimia, teknik grafika, kelistrikan, otomotif, teknologi informasi dan komunikasi, dan tata busana.

Data BPS Tahun 2015 menyatakan bahwa hanya 22,3% guru produktif pada jenjang SMK yang mengajar sesuai bidang kompetensinya. Hal tersebut memberikan arti bahwa kompetensi guru produktif masih rendah. Guru produktif masih belum mencapai kompetensi profesional, belum ada kesesuaian antara bidang keilmuan dengan materi yang diajarkan.

Permasalahan lain yang ada antara lain, ketersediaan guru produktif yang masih rendah sehingga masih banyak guru dengan latar belakang keilmuan yang tidak sesuai kompetensi keahlian yang ada. Grafik 1 menjelaskan tentang keadaan guru produktif



Gambar 1. Analisa guru produktif

Berdasarkan gambar 1 dapat dipahami bahwa kesulitan SMK menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas adalah karena keterbatasan kualitas dan kuantitas guru produktif. Peningkatan kualitas SMK untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas guru produktif menjadi guru yang profesional. Beberapa ciri guru produktif profesional, yaitu memiliki keahlian praktis yang mumpuni sesuai dengan bidang keahlian (mata pelajaran produktif); mampu merencanakan pelaksanaan pembelajaran berwawasan kejuruan; dan mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai / relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja (DU/DI). Peningkatan kompetensi guru produktif dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

1. Penyesuaian guru produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang diajarkan. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada guru produktif yang tidak sesuai dengan bidang keahlian untuk menyelesaikan pendidikan tingkat lanjut sesuai bidang keahlian yang diampu. Pemerintah dapat memberikan bantuan pendidikan sampai guru tersebut mendapatkan sertifikat pendidik yang sesuai, linier antara pendidikan S1/D4 dengan sertifikat pendidik.
2. Seiring dengan perkembangan yang sangat cepat dalam dunia Industri, maka kegiatan pelatihan / pemagangan di dunia usaha / industri dapat dijadikan model lain dalam peningkatan kualitas guru produktif. Pemagangan guru juga memberikan manfaat pada meningkatnya wawasan guru dalam dunia industri sehingga pola pengajaran dan materi pelajaran akan sesuai dengan kebutuhan dunia industri.
3. In House Training (IHT). Kegiatan ini dapat dipilih untuk penyelarasan kualitas guru produktif pada satu wilayah. Kegiatan IHT dapat dilakukan melalui kegiatan MGMP atau sejenisnya.
4. Pelatihan kemitraan sekolah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan materi tertentu dengan melibatkan seluruh guru produktif sesuai bidang keahlian melalui kerjasama dengan dunia industri atau perguruan tinggi.
5. Pelatihan berjenjang dengan memaksimalkan peran dan fungsi LPMP, P4TK atau lembaga pembinaan guru yang lain. Pelatihan dapat melalui kegiatan tatap muka atau melalui kegiatan dalam jaringan (daring).

Model pengembangan kompetensi guru juga dapat dilakukan melalui pengembangan model pendidikan guru produktif (GIZ, 2013), yaitu:

1. Model concurrent atau integrative model.
Pada model ini, mahasiswa belajar di perguruan tinggi pencetak guru. Mahasiswa yang mendaftar pada perguruan tinggi memang dicetak menjadi guru. Misalnya, seorang guru kimia maka kuliahnya berasal dari program studi pendidikan kimia. Melalui model ini masih ditemukan keterbatasan karena tidak semua kompetensi keahlian yang ada di sekolah memiliki program studi yang ada di perguruan tinggi. Misalnya, kompetensi keahlian produksi grafika.
2. Model consecutive, yaitu memperoleh kualifikasi sebagai guru setelah lulus dari universitas (sarjana atau magister).
Pada model ini dilakukan pendidikan untuk menyiapkan menjadi guru setelah lulus dari perguruan tinggi (sarjana / magister). Pendidikan guru merupakan pendidikan lanjutan atau spesialisasi pasca lulus sarjana / magister.
3. Model perekrutan para praktisi dari dunia kerja.
Para praktisi di dunia industri dapat menjadi guru berdasarkan pengalaman mereka bekerja sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah. Terdapat kelinieran bidang keilmuan antara kompetensi keahlian yang ada di sekolah dengan yang ada di perusahaan/ dunia industri.
4. Model rekrutmen praktisi yang memiliki gelar sarjana.
Para praktisi yang memiliki gelar sarjana dapat menjadi guru sesuai dengan bidang keahlian.
5. Model rekrutmen pekerja ahli (real practical practitioners)

Model pengembangan pendidikan guru produktif / kejuruan sebagaimana dikemukakan Grollmann & Rauner's [2] adalah sebagai berikut:

1. Purely methodological training in teaching methods. Pada metode ini dilakukan pelatihan terhadap metode pembelajaran. Pelatihan Pendidikan Guru Kejuruan Ini sering dihubungkan dengan model yang ada terutama didasarkan pada perekrutan praktisi di bidang pekerjaan tertentu.
2. An additive concept. Pada metode ini, seorang mahasiswa memperlajari mempelajari materi pelajaran kemudian memperoleh kualifikasi untuk sektor pendidikan setelah memperoleh keterampilan mengajar dalam program kursus yang ditunjuk. Model ini sering dikembangkan di Amerika Serikat. Selain itu juga sering ditemukan di Turki. Di Negara Turki, hampir 65% dari program mencakup materi pelajaran, sedangkan program selanjutnya untuk calon guru kejuruan dengan durasi sekitar 4 tahun.
3. Model yang didasarkan pada studi bersamaan dari materi pelajaran dan ilmu pendidikan, yang mengarah ke gelar Sarjana atau Magister.
4. integrated conception of vocational. Konsep ini didasarkan pada konsep integrasi disiplin kejuruan dan pengembangan kompetensi.

B. Analisa Kualitas SMK Berdasarkan Level Akreditasi

Tingginya angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga disebabkan rendahnya mutu pendidikan atau sekolah. Rendahnya kualitas sekolah disebabkan oleh manajemen sekolah yang kurang baik, hal ini karena beberapa faktor, antara lain: 1) penyelenggaraan pendidikan menggunakan pendekatan *educational production*

function atau input-input analisis yang tidak konsisten; 2) penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik. Hal ini menjadikan peran sekolah dalam mengelola pendidikan pada satuan pendidikan menjadi terbatas. Sekolah tidak leluasa dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas potensi sekolah; 3) peran serta orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim [6].

Penyelenggaraan pendidikan hendaknya mengutamakan kualitas dari pada kuantitas. Pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. Sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber daya pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, terdapat delapan standar pendidikan yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu

1. Standar isi, adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum sebagai pedoman pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.
2. Standar proses, adalah acuan pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
3. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah acuan / kriteria pendidik dan tenaga kependidikan berkaitan dengan Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi.
4. Standar sarana dan prasarana, adalah standar pendidikan tentang kriteria minimal tentang ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, tempat berolahraga, bengkel kerja, tempat bermain, tempat beribadah, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
5. Standar pengelolaan, adalah standar tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
6. Standar pembiayaan, adalah standar tentang pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan pada satuan pendidikan.
7. Standar penilaian pendidikan, adalah standar tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Berkaitan dengan standar nasional pendidikan, pemerintah melakukan penilaian untuk menilai mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia melalui akreditasi sekolah. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan [3], menyebutkan bahwa antara tahun 2014 sampai 2017 capaian akreditasi minimal terakreditasi "B" untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) sebesar 84%, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 81%, selanjutnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 85%, sedangkan untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 65%. Hal tersebut memberikan arti bahwa masih banyak sekolah yang berada di bawah standar minimal, terutama pada jenjang SMK yang masih rendah. Terdapat 35% Sekolah SMK mendapatkan penilaian di bawah standar. Data tersebut memberikan arti bahwa terdapat kesesuaian antara tingginya TPT berbanding lurus dengan kualitas sekolah, dalam hal ini distandarkan dengan nilai akreditasi sekolah.

C. Analisa DU/DI Pasangan SMK

Pendidikan sebagai salah satu pilar paling penting dalam pembangunan nasional, berfungsi untuk memaksimalkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia (Ihsan, 2011). Dalam rangka memaksimalkan fungsi tersebut maka pendidikan diselenggarakan secara bersama-sama antara pemerintah, institusi pendidikan,

dan masyarakat luas. Pendidikan dengan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dan saling berperan. Lebih-lebih dewasa ini, masyarakat Indonesia menyadari peranan pendidikan yang sangat penting sehingga peranan masyarakat dalam pendidikan [4]. Secara spesifik, dalam dunia SMK pihak masyarakat yang sangat berperan dalam pengembangan kualitas pendidikan adalah orang tua / wali yang tergabung dalam komite sekolah, dan dunia usaha / dunia industri (DU/DI).

PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 26 ayat (3), mengisyaratkan bahwa adanya standar kompetensi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah dalam rangka meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya. Oleh karenanya, pemerintah mewajibkan adanya pelaksanaan praktik kerja industri (Prakerin) pada jenjang SMK. Pelaksanaan Prakerin ini selalu melibatkan Dunia Usaha / Dunia Industri (DU/DI) sebagai mitra dalam pengembangan kompetensi lulusan.

Lebih lanjut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat ditekan melalui peningkatan kompetensi lulusan. Hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan kerjasama antara sekolah dengan DU/DI. Bentuk kerjasama antara DU /DI dengan sekolah pasangan antara lain: (1) dari sekolah ke DU/DI pasangan: melalui kegiatan pengenalan DU/DI, praktik kerja industri (Prakerin), magang guru, kunjungan industri, dan penelusuran karyawan dan penempatan; (2) dari industri pasangan ke sekolah: dapat berupa pemenuhan Pusat Sumber Belajar (PSB), informasi IPTEK, beasiswa pelajar atau guru, pengembangan kurikulum, pameran, rekrutmen tenaga kerja dan bantuan sarana dan prasarana atau bantuan dana kegiatan [1]

Kegiatan utama kerjasama antara DU/DI dengan sekolah adalah praktik kerja industri (Prakerin). Dalam kegiatan tersebut dilakukan beberapa program antara lain; penyusunan program, penyusunan kurikulum selaras dengan DU/DI, perencanaan waktu dan jenis kegiatan, pembelajaran siswa, melakukan bimbingan selama praktik dasar maupun praktik industri, melaksanakan penilaian dan uji kompetensi, uji profesi dan sertifikasi.

Hasil penelitian Perwitasari [5] menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara kompetensi siswa pada waktu uji kompetensi keahlian dengan kesesuaian DU/DI. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa siswa yang ditempatkan pada DU/DI yang relevan dengan kompetensi keahlian cenderung lebih terampil dan kompeten pada saat UKK.

Praktik kerja industri (Prakerin) atau dikenal dengan istilah pendidikan sistem ganda (PSG) menurut penelitian [7] menyatakan bahwa bahwa kemitraan antara sekolah dengan DU/DI merupakan kunci pokok keberhasilan prakerin / PSG. Pada penyelenggaraan Prakerin / PSG perlu keselarasan antara sekolah dengan DU/DI sehingga dapat program kegiatan dapat dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi secara bersama, sehingga terdapat relevansi kompetensi lulusan terhadap tuntutan kerja sesuai kebutuhan DU/DI.

Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan bahwa kebersamaan dan keselarasan antara sekolah dengan DU/DI adalah suatu keniscayaan dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan dan memberikan jaminan kompetensi bagi peserta didik sehingga pasca lulus dapat mendapatkan atau bahkan menciptakan pekerjaan.

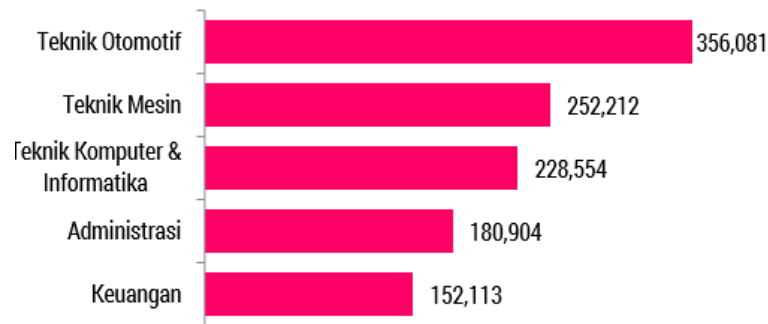
SMK dengan dunia usaha melalui *link and match* sebagai bentuk kemitraan dapat memberikan manfaat: a) siswa dapat mengambil manfaat secara langsung atas teknologi yang berkembang sangat cepat pada DU/DI sehingga memberikan bekal pada siswa lebih familiar dan tidak gagap terhadap perkembangan teknologi; b) memberikan motivasi kepada siswa untuk dapat berkreasi dan berinovasi sebagaimana yang dilakukan oleh DU/DI; c) meningkatkan kualitas lulusan SMK, utamanya dalam hal *softskill* bekerja, diantaranya: disiplin terhadap waktu dan belajar, etos kerja, budaya berkompetisi dan berprestasi; d) sekolah dengan mudah merancang dan merevisi kurikulum disesuaikan dengan tuntutan DU/DI sehingga kompetensi siswa sesuai dengan yang diinginkan oleh pasar; e) kemudahan dalam perekrutan dan penyaluran tenaga kerja [2].

D. Analisa Kompetensi Keahlian Pada SMK

Tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK juga dipengaruhi adanya *missed match* antara kompetensi yang dimiliki lulusan SMK dengan yang dibutuhkan dunia kerja. Ketidaksesuaian ini berada pada angka > 50% (pikiran rakyat, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa antara kompetensi yang dibuka pada sekolah SMK masih belum sejalan dengan kebutuhan DU/DI.

Lebih lanjut menurut Khurniawan, dkk (2019) tingginya angka pengangguran lulusan SMK juga disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1). adanya kesenjangan / disparitas mutu SMK. Tidak semua sekolah SMK mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai skill / keterampilan atau keahlian yang mumpuni; 2) ketidaksesuaian antara kompetensi keahlian yang dikembangkan sekolah dengan kompetensi yang dibutuhkan DU/DI, 3) keterbatasan informasi terhadap peluang kerja / akses kerja yang belum memadai.

Data kemendikbud menyebutkan bahwa kompetensi keahlian terbanyak yang menyumbang angka pengangguran adalah teknik otomotif, teknik mesin, teknik komputer dan informatika, administrasi, dan keuangan.



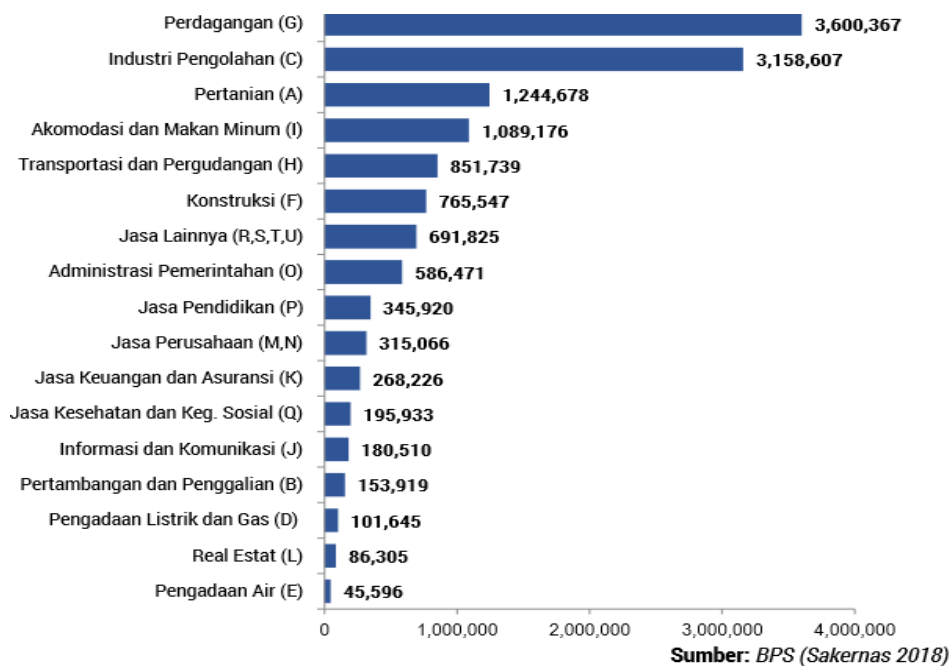
Sumber: BPS (Sakernas 2018)

Gambar 2. Angka pengangguran pada beberapa kompetensi keahlian di SMK

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa kompetensi keahlian teknik otomotif memberikan sumbangan angka pengangguran sebesar 356.081 jiwa. Angka tersebut lebih dari angka kompetensi keahlian keuangan. Pada kompetensi keahlian teknik mesin juga memberikan sumbangan pengangguran yang sangat besar sebesar 252.212 jiwa. Pada kompetensi keahlian teknik komputer & informatika dan administrasi masing-masing memberikan sumbangan angka pengangguran sebesar 228.554 jiwa dan 180.904 jiwa.

Gambar di atas memberikan makna bahwa minat siswa terhadap kompetensi keahlian otomotif dan mesin, TIK, administrasi dan keuangan sangat besar, namun keterserapan terhadap dunia kerja yang masih minim. Sekolah memfasilitasi siswa untuk memilih kompetensi tersebut namun ternyata terjadi *mismatch* (ketidaksi-sesuaian) dengan yang terjadi atau yang dibutuhkan di DU/DI.

Data di lapangan berdasarkan data BPS Tahun 2018 tentang jumlah penduduk bekerja lulusan SMK menurut lapangan usaha dapat dinyatakan sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS (Sakernas 2018)

Gambar 3. Jumlah penduduk bekerja lulusan SMK menurut lapangan usaha

Berdasarkan gambar 3 dapat diketahui bahwa lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja lulusan SMK adalah bidang perdagangan, industri pengolahan, pertanian, akomodasi makan dan minum dan transportasi dan pergudangan. Sedangkan lima bidang pekerjaan yang menyerap tenaga kerja lulusan SMK paling rendah antara lain: pengadaan air, real estat, pengadaan listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, dan informasi dan komunikasi.

Data tersebut berbanding terbalik dengan minat siswa mendaftar di SMK. Sekolah dengan kompetensi keahlian pertanian, pemasaran justru kurang diminati masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya untuk menyelaraskan antara kompetensi keahlian sekolah dengan kebutuhan DU/DI, salah satunya melalui program kompetensi keahlian unggulan berbasis potensi lokal.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang ada dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor banyaknya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada jenjang SMK adalah: (1) Keterbatasan guru produktif/kejuruan dari segi kuantitas maupun kualitas; (2) Mutu sekolah SMK yang relatif masih rendah, hal ini berdasarkan minimnya jumlah sekolah yang mendapatkan nilai akreditasi minimal B; (3) Peranan DU/DI pasangan masih belum optimal bahkan ada ketidaksesuaian antara DU/DI dengan kompetensi keahlian sekolah; dan (4) Terjadi mismatch antara kompetensi keahlian yang dikembangkan sekolah dengan keahlian yang dibutuhkan DU/DI.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraeni, Novita Dwi, Yoto, dan Basuki. 2015. *Studi Tentang Peran Serta Orang Tua dan Dunia Usaha / Industri Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK Negeri 1 Singosari*. Jurnal Teknik Mesin, Tahun 23, No. 1, April 2015
- [2] Grollmann, Philipp. 2008. The Quality of Vocational Teachers: teacher education, institutional roles and professional reality. *European Educational Research Journal*. Volume 7 Number 4 2008.
- [3] Kemendikbud. 2015. *Grand Design Pengembangan Teaching Factory dan Technopark di SMK*. Jakarta: Dit. PSMK Kemendikbud.
- [4] Muhandi. 2004. *Kontribusi dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia. Naskah Juara Harapan I Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Dosen TA 2004/2005*. Mimbar Volume XX No. 4 Oktober – Desember 2004 : 478 – 492.
- [5] Perwitasari, Dian Fitri. 2013. Hubungan Fasilitas Praktikum TKJ di Sekolah Kesesuaian Tempat Prakerin, dan Kompetensi TKJ Siswa dengan Hasil Uji Kompetensi Keahlian. *Jurnal Pendidikan Sains*, Volume 1, Nomor 4, Desember 2013, Halaman 425-431
- [6] Sudarwan Danim. 2006. *Visi Baru Manajemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [7] Wayong.Ch.Aaltje.D.2010.<http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/APTEKINDO/index>.